



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS

SKRIPSI

ANALISIS KEPATUHAN PELAPORAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009
DI KOTA PADANG

OLEH:

RAHMAT

05 153 072

*Ditujukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi*

PADANG

2010

ABSTRAK

Penelitian ini menguji, bagaimana tingkat kepatuhan partai politik peserta pemilihan umum anggota legislatif 2009 di Kota Padang dalam pelaporan dana kampanye pemilihan umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antara partai politik peserta pemilu yang mendapat kursi dengan yang tidak mendapatkan kursi. Untuk menguji perbedaan tingkat kepatuhan pada penelitian ini, digunakan data sekunder dari laporan audit dana kampanye partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2009 di kota Padang.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2009 di Kota Padang yang mendapatkan kursi sebesar 91,7% dan tingkat kepatuhan partai politik yang tidak mendapatkan kursi sebesar 29,8%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang cukup signifikan antara partai yang mendapat kursi dengan yang tidak mendapat kursi di legislatif Kota Padang dimana partai yang mendapat kursi patuh atas prosedur sedangkan partai yang tidak mendapat kursi tidak patuh.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan salah satu konsekuensi logis dari pelaksanaan asas demokrasi di Indonesia. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih pada pesta demokrasi ini. Melalui pemilihan umum dipilih orang-orang yang memiliki kemampuan dan berkeinginan untuk mengisi jabatan tertentu dipemerintahan dalam rangka melanjutkan cita-cita nasional. Segala upaya dan daya akan dikerahkan kandidat peserta pemilu untuk dapat terpilih dan memenangi pemilihan umum.

Transisi menuju demokrasi yang dialami Indonesia, semenjak tahun 1998 telah menyita perhatian yang luar biasa besar dari seluruh elemen masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum meningkat, juga jumlah partai politik peserta pemilihan umum meningkat secara signifikan, pada era orde baru hanya 3 (tiga) partai politik sebagai peserta pemilihan umum setelah era reformasi 48 (empat puluh delapan) partai politik mengikuti pemilihan umum 1999 dan pemilihan umum 2004 sebanyak 24 (dua puluh empat) partai politik. Sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 38 partai politik nasional dan 6 (enam) partai lokal Nanggroe Aceh Darussalam menjadi peserta pemilihan umum. Media massa, akademisi, pengamat politik dan elemen lainnya juga semakin besar perhatiannya untuk pemilihan umum.

Penyelenggara pemilu juga mengalami beberapa perubahan dalam hal posisi dan peran didalam penyelenggaraan pemilu. Pada era Orde Baru penyelenggara

pemilihan umum adalah Lembaga Pemilihan Umum (LPU). LPU pada saat itu sangat jauh untuk dapat dikatakan lembaga yang independen dan otonomi. LPU beranggotakan para menteri pemerintahan dan diketuai langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Namun setelah jatuhnya rejim Orde Baru, LPU diganti namanya menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai kritik terhadap lembaga sebelumnya dimana lembaga penyelenggara pemilu diduga digunakan sebagai alat pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

Penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur dan adil membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Ini dirasakan terutama oleh negara-negara yang tengah mengalami proses transisi menuju demokrasi, dimana banyak hal berubah, seperti meningkatnya jumlah peserta pemilu. Pemilu anggota legislatif 2009 menurut KPU menghabiskan anggaran negara sekitar 13,5 triliun rupiah. Hal ini dirasakan cukup membebani APBN Indonesia yang berjumlah sekitar 1.000 triliun rupiah atau setara dengan 1.3% dari APBN 2009. Kebutuhan dana untuk pemilu tersebut belum lagi termasuk biaya sosial yang ditimbulkan atas pemilu tersebut yang cukup besar, seperti anggaran yang disediakan oleh peserta pemilu baik partai politik maupun perseorangan dalam rangka upaya untuk memperoleh kemenangan dalam pemilu. Anggaran yang dikeluarkan yang begitu besar seharusnya dapat menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh dari pengelola negara dalam rangka mencapai tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Partai politik memegang peranan utama dalam proses pemilihan umum, mulai dari seleksi calon anggota legislatif sampai pencalonan pasangan kepala daerah dan kepala negara. Sesuai dengan konstitusi negara bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mencalonkan kepala negara. Oleh

BAB V PENUTUP

Berdasarkan pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka berikut ini disajikan kesimpulan yang dapat diambil serta implikasi, keterbatasan dan saran dalam penelitian ini.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat tingkat kepatuhan yang cukup tinggi atas partai politik peserta pemilu yang mendapatkan kursi di legislatif kota Padang, yakni dengan tingkat kepatuhan rata-rata sebesar 91,7%, atau dikategorikan patuh.
2. Terdapat tingkat kepatuhan yang rendah atas partai politik peserta pemilu yang tidak mendapat kursi di legislatif kota Padang, yakni dengan tingkat kepatuhan rata-rata hanya sebesar 29,8%, atau dikategorikan tidak patuh.
3. Rata-rata tingkat kepatuhan partai politik peserta pemilu legislatif Kota Padang tahun 2009 adalah sebesar 51,8% atau patuh sebanyak 13,3 (tiga belas koma tiga) dari 26 (dua puluh enam) peserta pemilu, atau dikategorikan kurang patuh.
4. Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang cukup signifikan antara partai yang mendapat kursi dengan yang tidak mendapat kursi di legislatif Kota Padang. Hasil uji t yang telah dilakukan dengan menggunakan Independent Sample *T-Test*, level signifikansi 0.05(5%), diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0.00(0%) lebih kecil dari 0,05 (5%), sehingga dapat disimpulkan H_0 dalam penelitian ini ditolak, terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang signifikan

DAFTAR PUSTAKA

- Alfahri, 2007. **Resume Kewarganegaraan**. Ditelusuri 15 Februari 2009. <http://www.alfahri.blogspot.com>.
- Arens dkk. 2008. **Auditing and Assurance Services-An Integrated Approach**, 12th edition. Pearson Education.
- Basri, Seta. 2009. **Sistem Kepartaian dan Partai Politik**. Ditelusuri 15 Februari 2009. <http://www.setabasri.blogspot.com>.
- Boynton dkk. 2006. **Modern Auditing: Assurance Services, and the Integrity of Financial Reporting**, 8th edition. John Wiley & Sons.
- Budiardjo, Miriam. 2004. **Dasar-Dasar Ilmu Politik**. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Hanifalia, 2005. **Analisis Kepatuhan Peserta Pilkada Dalam Penyusunan Laporan Dana Kampanye Di Sumatera Barat Tahun 2005**. Padang: Skripsi. Universitas Andalas.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang, 2002. **Metodologi Penelitian Bisnis**, Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta.
- Kell, Walter G, and William C. Boynton, Raymond N. Johnson, 2001. **Modern Auditing**. New York-USA: John Wiley & Son's Inc.
- Komisi Pemilihan Umum, 2009. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2009**. <http://www.kpu.go.id>.
- , 2009. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2009**. <http://www.kpu.go.id>.
- Masduki, Teten. **Pemilu dan Korupsi**, Kompas, 6 April, 2009.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2008. **Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik**. Jakarta.
- , 2008. **Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**. Jakarta.